

## Kampanye Partai-Partai Politik Menjelang Pemilihan Umum 1955 Di Kota Semarang (Studi Kasus PNI, PKI, Nu, dan Masyumi)

Nanang Rendi Ahmad, Wasino, dan Putri Agus Wijayati ✉

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang-Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Mei 2019

Disetujui Juni 2019

Dipublikasikan Juli 2019

*Keywords:*

*political parties, election 1955, Semarang.*

### Abstrak

Kondisi sosial-politik Indonesia tahun 1950-an menjadi suatu arena bagi partai-partai politik untuk menunjukkan keberadaannya di tengah masalah-masalah sosial-politik yang menimpa Indonesia, setidaknya itu terjadi ketika wacana diselenggarakannya Pemilihan Umum (pemilu) berhembus. Partai-partai politik dengan masing-masing ideologi partai yang diusung saling mengkampanyekan jalan keluar atas masalah-masalah yang dihadapi Indonesia tahun 1950-an. Semua yang dilakukan partai-partai politik itu adalah upaya meraih hati rakyat untuk persiapan Pemilu 1955. Penelitian ini membahas tentang hubungan antara kondisi sosial-politik Indonesia tahun 1950-an dengan kampanye partai-partai politik. Penelitian ini juga mencoba menunjukkan bahwa latar belakang historis dan kondisi sosial-politik suatu daerah turut mempengaruhi peta kekuatan politik dan hasil Pemilu 1955. Dalam kasus yang terjadi di Kota Semarang, dengan keluarnya PKI sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 1955 di Kota Semarang, menunjukkan bahwa kampanye bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi hasil yang diraih suatu partai. Akan tetapi ada faktor lain yang juga turut mempengaruhi hasil yang diraih suatu partai. Faktor tersebut adalah latar belakang historis dan kondisi sosial-politik di Kota Semarang.

### Abstract

*The Indonesia's socio-political conditions in the 1950s became an arena for political parties to show their existence amid the socio-political problems that afflicted Indonesia, at least that happened when the discourse held the election blew. Political parties with each party's ideology promoted each other solutions to the problems that threw Indonesia in the 1950s. All that the political parties did was an effort to win the hearts of the people in preparation for the 1955 elections. This research discusses the relationship between Indonesian socio-political conditions in the 1950s and the campaign of political parties. This research also tries to show that the historical background and socio-political conditios of a region also influence the map of political power and the results of the 1955 elections. In the case of the city of Semarang, with the release of the PKI as the winner of the most votes in the 1955 elections in the Semarang City, it showed that the campaign was not the only factor affecting the desires of a party. But there are other factors that also influence the results achieved by a party. These factors are historical background and socio-political conditions in the city of Semarang.*

© 2019 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: [sejarah@mail.unnes.ac.id](mailto:sejarah@mail.unnes.ac.id)

ISSN 2252-6633

## PENDAHULUAN

Era 1950-an, ketika wacana penyelenggaraan Pemilu 1955 berhembus semakin kencang, Indonesia dihadapkan pada masalah krisis kabinet. Krisis kabinet ini ditandai dengan terjadinya jatuh-bangunnya kabinet. Dalam waktu lima tahun, telah terjadi pergantian kabinet sebanyak lima kali. Dari semua kabinet yang pernah berkuasa, Pemilihan Umum hampir selalu tercantum sebagai program kerja. Namun program tersebut baru dapat terealisasi pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap (Feith, 1999:4).

Krisis kabinet menjadi sebuah kenyataan yang mewarnai kondisi sosial-politik Indonesia era 1950-an. Krisis kabinet ini tidak bisa dipandang sebagai sebuah kenyataan yang berlalu begitu saja dan memberikan dampak pada perpolitikan di Indonesia. Sebab, di masa-masa ini sesungguhnya pertarungan wacana antar partai-partai politik telah dan sedang berlangsung.

Kondisi sosial-politik tahun 1950-an yang penuh dengan intrik politik itu akhirnya menjadi sebuah arena atau panggung bagi partai-partai politik untuk menampilkan diri di tengah masalah-masalah sosial dan ekonomi yang sedang menimpa Indonesia. Masing-masing partai politik, dengan ideologi partai yang diusung, saling mengkampanyekan jalan keluar atau solusi atas masalah-masalah tersebut. Secara tidak langsung, semua itu dilakukan untuk menarik perhatian dan hati rakyat.

Pertarungan wacana antar partai politik tidak hanya terjadi di tingkat pusat (Jakarta). Di tingkat daerah, pertarungan wacana antar partai politik tidak kalah sengit dengan apa yang terjadi di tingkat pusat. Apalagi partai-partai politik seringkali membawa isu-isu nasional dan pusat ke tingkat daerah. Kondisi sosial-politik dan latar belakang historis tiap daerah tentu berbeda. Hal inilah yang mempengaruhi pola, cara, strategi yang ditempuh, dan karakteristik kampanye yang dilakukan oleh partai-partai politik.

Di Kota Semarang, pertarungan wacana dalam kampanye juga terjadi. Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, masyarakat Kota Semarang tentu memiliki tingkat kesadaran

politik yang tinggi. Selain karena memang Semarang telah menjadi pusat perpolitikan di Jawa Tengah sejak masa kolonial, akses terhadap informasi di Kota Semarang lebih cepat didapatkan daripada daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki riwayat sejarah politik yang sangat mempengaruhi pembentukan struktur masyarakat dengan kehidupan sosial dan politiknya. Hal ini akan mempengaruhi strategi kampanye yang ditempuh oleh masing-masing partai politik untuk merebut hati dan simpati masyarakat Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan satu permasalahan utama untuk dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yakni bagaimana komunikasi politik yang dibangun oleh partai-partai politik peserta pemilu 1955 dalam kampanyenya sebagai upaya merebut simpati masyarakat Kota Semarang? Untuk menjawab permasalahan utama tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana kondisi sosial-politik Indonesia tahun 1950-1955? (2) Bagaimana kampanye yang dilakukan PNI, PKI, NU, dan Masyumi di Kota Semarang? (3) Bagaimana hasil pemilu 1955 di Kota Semarang?

## METODE

Sebagai penelitian sejarah, penelitian ini menggunakan empat tahap penelitian yakni: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan tahapan untuk mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan (Kuntowijoyo, 2013:95; Wasino dan Hatatik, 2018). Pada tahap ini saya mengumpulkan data dengan proses menggali sumber sejarah yakni sumber tertulis. Dalam hal ini saya mengumpulkan sumber tertulis berupa surat kabar dan dokumen sezaman yang dikategorikan sebagai sumber primer. Sebagian besar sumber primer saya dapat dari Depo Arsip Suara Merdeka yang berupa surat kabar dari tahun 1950-1955. Sebagian besar koran-koran *Suara Merdeka* tahun 1950-1955 masih terjaga dengan baik dan dapat terbaca. Sementara sumber primer lain saya dapatkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang yang

menyimpan data-data tentang hasil Pemilu 1955 di Kota Semarang. Data hasil Pemilu 1955 di Kota Semarang yang saya dapatkan di KPU Kota Semarang juga dimuat dalam *Suara Merdeka* yang saya dapatkan di Depo Arsip Suara Merdeka.

Selain sumber primer, saya juga mengumpulkan sumber sekunder berupa buku dan jurnal. Untuk sumber sekunder berupa buku, saya mencari buku yang merupakan hasil penelitian sezaman. Sementara untuk sumber sekunder berupa jurnal, saya mendapatkannya dari hasil pencarian saya di internet dan di perpustakaan-perpustakaan *online*.

Setelah tahap heuristik, saya masuk ke tahap selanjutnya yakni kritik sumber. Dalam tahap ini saya melakukan pemilahan sumber mana yang relevan untuk digunakan dan mana yang tidak. Dalam metode penelitian sejarah, kegiatan ini disebut dengan kritik internal. Setelah melakukan kritik sumber, tahap selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi adalah kegiatan menafsirkan fakta-fakta yang telah diseleksi di tahap sebelumnya. Setelah melalui tiga tahap tersebut, tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah yang akhirnya tersaji dalam tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kondisi Sosial Politik Indonesia 1950-1955: Sebuah Panggung Bagi Partai-Partai Politik Untuk Menjaring Massa**

Periode 1950an, terutama masa sebelum tahun 1959 atau yang lebih dikenal sebagai periode “Demokrasi Parlemerter” merupakan masa-masa ketika Indonesia sebagai negara baru sedang meraba-raba perwujudan demokrasi di masa depan. Sebab, sejak proklamasi kemerdekaan, gambaran tentang masa depan demokrasi itu masih belum menentu. Maka tak heran jika di periode Demokrasi Palemerter, terutama masa-masa sebelum Pemilu 1955 diselenggarakan, banyak bermunculan peristiwa-peristiwa politik yang tegang. Peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di masa-masa sebelum Pemilu 1955 itu, sedikit-banyak mempengaruhi peta kekuatan politik di Indonesia (Compton, 1993).

Isu-isu sosial-politik yang terjadi dalam rentang waktu dari 1950 sampai menjelang diselenggarakannya Pemilu 1955 menjadi semacam arena atau panggung bagi partai-partai politik untuk menampilkan diri di tengah masalah-masalah yang bergulir. Kemunculan partai-partai politik berawal dari dikeluarkannya Maklumat 3 November 1945 yang mendorong dibentuknya partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi dan mewacanakan penyelenggaraan pemilu. Ketika partai-partai politik telah berdiri, mereka menjalankan fungsinya dalam sistem parlementer yang menggantikan sistem sebelumnya, yakni sistem presidensial. Sistem parlementer meniscayakan partai-partai politik hadir di tengah perpolitikan Indonesia kala itu. Pengaruh partai politik juga sangat kuat dalam pemerintahan seiring dengan sistem parlementer yang dijalankan berdasarkan Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945. Berdasarkan sistem parlementer, pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pembentukan kabinet dilakukan dengan persetujuan KNIP sebagai parlemen Indonesia saat itu. Bahkan, menteri sebagai satu kesatuan kabinet maupun secara sendiri-sendiri bertanggungjawab kepada KNIP. KNIP menentukan pembentukan dan jatuhnya kabinet (Noer dan Akbarsyah, 2005:133).

### **PNI dalam Panggung Politik Nasional Menjelang Pemilu 1955**

Kiprah PNI dalam panggung politik nasional era 1950-an meninggalkan catatan-catatan baik dan buruk. Pada kesempatan pertama mereka menduduki kursi Perdana Menteri dengan salah satu wakilnya yakni Wilopo, PNI tidak memiliki prestasi yang bagus. Banyak kendala yang membuat partai ini harus mengakui catatan buruknya. Dari sekian permasalahan yang dihadapi Kabinet Wilopo, Peristiwa 17 Oktober 1952 dan kasus agraria di Sumatera Utara mungkin menjadi dua permasalahan yang paling disorot oleh publik dan menggoyahkan kabinet ini, meski permasalahan-permasalahan lain—selain dua permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya—sebenarnya juga menjadi

permasalahan yang serius bagi Kabinet Wilopo seperti misalnya dengan munculnya gerakan-gerakan separatisme di tingkat daerah. Sebenarnya, insiden 17 Oktober tersebut menyoal Parlemen, akan tetapi secara otomatis kasus ini tentu juga berdampak pada goyahnya kabinet. Keadaan kabinet yang sedang goyah tersebut kemudian ditimpa kembali dengan permasalahan tanah di Sumatera Utara atau yang dikenal dengan Peristiwa Tanjung Morawa. Sebuah mosi tidak percaya atas program distribusi tanah di Sumatera Utara diajukan ke Parlemen oleh Sidik Kertapati. Ketika Komite Sentral PNI memutuskan mendukung prinsip-prinsip umum mosi Kertapati, Masyumi mengumumkan bahwa ia akan menarik menteri-menterinya dari kabinet. Keadaan yang demikian semakin membuat Kabinet Wilopo mendekati kejatuhan, akhirnya pada 4 Juni 1953 mimpi buruk itu benar-benar terjadi dan kabinet menyerahkan mandatnya (Compton, 1993:3-49).

PNI kembali masuk ke dalam kabinet ketika salah satu tokohnya yakni Ali Sastroamijoyo menjadi Perdana Menteri pada tahun 1953 menggantikan Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Pada era kepemimpinan Ali, Masyumi tidak masuk dalam susunan kabinet. Hal ini memunculkan asumsi bahwa pertentangan antara dua partai ini tajam. Pertentangan ini akan semakin jelas terlihat ketika kedua partai ini saling serang dengan cara memutar isu kegagalan program kerja kabinet lawan dan membanggakan keberhasilan program kerja kabinet masing-masing. Perseteruan ini terjadi hingga menjelang pemilu 1955 diselenggarakan. Perseteruan kedua partai ini merupakan upaya mereka masing-masing untuk membangun citra di masyarakat sebagai persiapan menghadapi Pemilu 1955 (Feith, 1999).

### **PKI dalam Panggung Politik Nasional Menjelang Pemilu 1955**

Sebagai suatu partai yang memimpikan memiliki basis pada masyarakat petani, sudah semestinya apabila kebijakan-kebijakan PKI dibumikan pada tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat petani,

misalnya saja kampanye tentang land reform (Firdausi, 2017:4-5). Dalam beberapa kesempatan, di tengah dinamika sosial-politik Indonesia tahun 1950-an, PKI menampilkan diri sebagai wujud aktualisasi ideologi partai dan upaya menjaring massa. Sejak meletusnya Perang Korea, tingkat kemakmuran merosot tajam, masa-masa yang relatif sulit memukul petani, buruh perkebunan, dan “karyawan perusahaan-perusahaan nasional”. Kebijakan PKI hanyalah menampilkan diri sebagai sahabat yang andal bagi ketiga kelompok itu, dan menggambarkan bahwa semua kesulitan ekonomi sumbernya adalah rencana busuk para kapitalis asing dan pemerintah Indonesia yang tersandera. Dengan demikian dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan PKI tersebut adalah wujud aktualisasi ideologi partai dan secara tidak langsung dapat menjaring massa. Dalam konflik tanah Sumatera Utara (Tanjung Morawa) misalnya, kaum komunis mampu memimpin perlawanan terhadap pemerintah melalui organisasi-organisasi “front”-nya dan berkat program agraria yang terumus baik. (Compton, 1993:35).

### **Partai NU dalam Panggung Politik Nasional Menjelang Pemilu 1955**

Dinamika politik tahun 1950an yang penuh dengan ketegangan, NU cukup dapat dilihat di permukaan. Sebagai kekuatan baru yang memiliki basis massa Islam di pedesaan, NU cukup diperhitungkan keberadaannya oleh partai-partai lain dalam menggalang kekuatan. Dari sana sebenarnya, NU cukup mendapat panggung untuk menunjukkan bahwa NU telah benar-benar siap menghadapi panasnya panggung politik nasional waktu itu. Paling tidak secara perlahan, NU telah mengikis pandangan skeptis dan keraguan publik yang menganggap NU tidak cakap dalam urusan politik karena sifatnya yang dikenal konservatif—pandangan semacam ini terutama muncul dari golongan Islam modernis (pembaharu), yang membuat NU kecewa dan memutuskan untuk menjadi partai sendiri.

Struktur Kabinet Ali Sastroamidjojo (PNI), yang tidak satu pun terisi oleh wakil dari

Masyumi, NU ditarik dan dijatohkan tiga kursi dalam kabinet, yakni Wakil Perdana Menteri, Kementerian Agama dan Kementerian Pertanahan (Compton, 1993: 42). Terlepas dari apakah struktur kabinet tersebut merupakan wujud dari pertentangan dan sentimen antara PNI dan Masyumi atau tidak, yang jelas ini dapat menjadi bukti bahwa NU juga diperhitungkan meski dianggap partai kecil dan konservatif. Nampaknya, NU menjadi partai yang mudah menerima ajakan kerja sama dengan partai apapun. Sejak menjadi partai politik, NU selalu masuk dalam susunan kabinet meski tengah terjadi polarisasi politik yang cukup panas. NU juga nampaknya dapat mengendalikan sentimen-sentimen pribadi dan dendam masa lalunya dengan partai lain. Sikap NU yang demikian menurut pandangan penulis adalah upaya untuk menjaga eksistensi NU sebagai partai politik dengan tetap membawa karakteristik dan ideologinya. Seperti apa yang kita ketahui sebelumnya, bahwa dalam susunan Kabinet Ali, NU ada di dalamnya. Dalam susunan kabinet tersebut, terdapat beberapa orang dari sayap kiri. Hal ini membuat NU mendapat serangan tuduhan sebagai partai “kafir” yang berhembus di tingkat daerah, meski tidak membawa dampak besar bagi eksistensi NU. Tuduhan tersebut segera ditangkis oleh NU lewat klarifikasi dari anggota PBNU ketika rapat umum di Solo (Suara Merdeka, 9 Maret 1955).

### **Masyumi dalam Panggung Politik Nasional Menjelang Pemilu 1955**

Sebagai partai yang dianggap besar, Masyumi memiliki orang-orang yang dapat menempati posisi strategis dalam struktur kabinet di era Demokrasi Parlementer. Dua kabinet pertama di era Demokrasi Parlementer dikepalai oleh orang Masyumi yang sangat berperan, yakni Natsir dan Sukiman. Keduanya adalah Perdana Menteri yakni pada Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Sukiman (1951-1952). Kemudian pada 1955, Masyumi kembali mendapat posisi strategis di kabinet dengan menjadikannya salah satu kadernya, yakni Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri (Compton, 1993).

Seperti halnya partai-partai lain, Masyumi juga bersitegang dengan lawan-lawan politiknya. Masyumi paling sering bertentangan dengan PNI, selain juga dengan PKI. Pertentangan-pertentangan dengan PNI dan PKI turut menjadi faktor penentu isi kampanye Masyumi, dan masalah yang paling sering diputar adalah isu dasar negara serta peran Islam dalam negara. Selain itu yang tidak kalah penting adalah antara Masyumi dan PNI saling memutar isu kinerja kabinet. Masyumi sering mengemukakan kegagalan-kegagalan kinerja kabinet Ali dari PNI khususnya dalam sektor ekonomi sembari menunjukkan capaian-capaian baik Kabinet Burhanuddin Harahap, salah satunya adalah segera terealisasinya rencana Pemilu 1955 di masa jabatan Burhanuddin Harahap. Jika sudah demikian, giliran Masyumi mendapat serangan dari PNI dan PKI yang mengangkat isu kelangkaan garam, kenaikan harga beras dan minyak goreng pada pekan-pekan menjelang Pemilu 1955 diselenggarakan (Feith, 1999:15-28).

### **Kampanye di Kota Semarang**

Kendatipun kejadian-kejadian di Jakarta (pusat) sangat tegang, namun partai-partai politik tidak melupakan kerja-kerja untuk menyebarluaskan pengaruhnya di tingkat daerah. Artinya, sepanjang menyangkut upaya menarik suara pemilih sebanyak-banyaknya, kegiatan partai tingkat elite di Jakarta tidak penting artinya, kecuali jika kegiatan itu dapat menjadi pedoman dan sumber kekuatan bagi kampanye partai bersangkutan di tingkat yang lebih rendah (Feith, 1999:29). Meskipun tiap partai politik berupaya menjangkau masa dengan cara menyerang lawan politiknya dengan isu-isu yang dapat menjatuhkan, kondisi sosial-politik di tiap daerah serta latar belakang sejarah tiap daerah yang berbeda-beda juga menjadi unsur yang kuat dan menentukan peta politik di daerah tersebut. Ideologi dan wacana yang diusung suatu partai politik yang bertolak belakang dengan latar belakang sejarah, kondisi sosial-politik, dan kultur kebudayaan tidak akan memiliki daya pikat kuat terhadap masyarakat daerah tersebut. Hal ini juga terjadi di Kota Semarang.

Kota Semarang mempunyai perjalanan sejarah yang banyak melibatkan pergerakan buruh sejak masa kolonial. Latar belakang sejarah ini berpengaruh terhadap kondisi sosial-politik Semarang di masa-masa selanjutnya. Pada akhirnya hal ini membuat struktur masyarakat dan basis kultur masyarakat Kota Semarang banyak didominasi oleh kaum buruh. Hal ini tentu juga berpengaruh terhadap peta kekuatan politik di Kota Semarang yang akan berpengaruh juga terhadap cara dan strategi kampanye partai-partai politik dalam menghadapi Pemilu 1955.

### **Kampanye PNI di Kota Semarang**

Menurut Cribb dan Kahin (Ahmad, 2016: 54) menyebut Partai Nasional Indonesia (PNI) sebelum pelaksanaan pemilihan umum dianggap sebagai partai terbesar kedua. Selama revolusi partai ini berkembang luas berlandaskan dukungan terutama dari elit administratif dan dari *abangan* kaum tani pada Jawa dan mengandung satu jangkauan luas dengan sudut pandang ideologis. PNI memiliki padangan utama yakni Marhaen atau “nasionalisme proletar”. Dalam perjalanannya, partai ini selalu mengusung dan membawa ideologi Marhaenisme untuk menarik hati rakyat. Pemilihan Marhaenisme sebagai ideologi partai dan *core frame* kampanye adalah langkah yang politis, sebab ideologi ini memiliki daya pikat yang kuat di masyarakat. Selain karena ideologi ini digadag-gadag dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik karena dianggap sesuai dengan alam kebudayaan masyarakat Indonesia khususnya *wong cilik*, ideologi ini juga lekat dengan nama Sukarno.

Di Semarang, PNI memiliki strategi tersendiri untuk memikat hati masyarakat Kota Semarang. Strategi politik yang dimiliki PNI yaitu: (1) Menyuarakan Ideologi Marhaenisme, (2) Memikat hati masyarakat dengan Sukarno, (3) Mengadakan pertemuan kelompok di tempat yang pendukungnya sedikit, (4) Pada waktu pemilihan sudah dekat, akan diadakan ronda malam dan mengingatkan masyarakat untuk memilih PNI (Dewantarina, 2012: 73-74). Dibentuknya panitia pemilihan umum di

Semarang, direspon dengan cepat oleh anggota-anggota PNI cabang Semarang dengan mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah kerja dan strategi dari PNI. Realisasi dari respon tersebut misalnya adalah pembentukan anak ranting di Kelurahan Mlatiharjo oleh PNI cabang Semarang dalam suatu pertemuan pada 1 September 1954 di Asrama Kaligawe Semarang (Dewantarina, 2012: 74). Kaligawe adalah sebuah daerah di Kota Semarang yang secara geografis dekat dengan pesisir. PNI cabang Semarang mungkin menyadari bahwa daerah yang dekat dengan pesisir bukanlah daerah basis massa yang kuat bagi mereka. Daerah pesisir di Kota Semarang adalah daerah yang didominasi oleh buruh pelabuhan yang merupakan basis massa PKI. Dengan demikian dapat dilihat bahwa PNI cabang Semarang benar-benar menerapkan strategi politik PNI dengan membentuk kantong-kantong dukungan di daerah yang minim pendukung. Dengan harapan, mereka dapat merasuk dan merebut massa partai lain di daerah tersebut.

Selain gencar membentuk kantong-kantong dukungan di daerah-daerah yang ditentukan, PNI juga gencar melakukan penyebaran wacana dan ideologi lewat media massa. Dalam terbitan *Suluh Indonesia* tanggal 14 September 1955, memuat iklan yang bertuliskan: “Menusuk kepala banteng dalam segitiga, berarti menuju masyarakat sama rata, sama bahagia”. Dua hari menjelang diselenggarakannya Pemilu 1955 untuk pemilihan parlemen, PNI memuat iklan-iklan di media massa. Di *Suluh Indonesia* edisi 27 September 1955, PNI memuat iklan yang bertuliskan: “Menusuk kepala banteng dalam segitiga berarti memilih Front Marhaenisme yang anti kapitalisme dan imperialisme”. Anti kapitalisme dan imperialisme adalah wacana yang sering didengungkan oleh PNI selain Marhaenisme dan kedekatan kultural dengan Sukarno. Hal ini tidak terlepas dari keadaan politik 1950-an yang menduga banyak unsur yang masih mendukung atau pro terhadap kolonialisme dan imperilisme. Dengan ini, PNI tampil dengan membawa slogan yang memuat anti-tesis dari itu. Selain di *Suluh Indonesia* yang

merupakan media massa milik PNI, PNI juga memuat iklan di surat kabar *Suara Merdeka* dengan gambar yang sama selama dua hari berturut-turut, yakni pada edisi 26 dan 27 September 1955. Iklan tersebut memuat tanda gambar PNI yang sedang ditusuk dan bertuliskan: “Berarti: Mempertahankan Bung Karno sebagai Presiden, Mempertahankan Pantja Sila sebagai Dasar Negara R.I, Rakjat hidup tentram dan makmur, Pengaruh Imperialisme asing lenjap dari Indonesia, Masyarakat sama rata sama bahagia akan terlaksana” (*Suara Merdeka*, 26 dan 27 September 1955).

### **Kampanye PKI di Semarang**

Sejak masa kolonial, PKI telah dikenal sebagai organisasi yang mempunyai kedekatan kultural dengan golongan petani dan buruh. Dalam beberapa peristiwa yang mempertentangkan antara pemerintah kolonial dan rakyat, yang berkisar pada masalah-masalah agraria dan eksploitasi tenaga kerja, PKI hampir selalu muncul dan berada di belakang rakyat untuk melawan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial. Hal ini yang membuat PKI hidup di kalangan petani dan buruh dan mengikat mereka menjadi basis massa PKI. Dalam menghadapi pemilu 1955, PKI tetap mencitrakan diri sebagai partai yang dekat dengan golongan petani dan buruh. Marxisme adalah landasan dan ideologi yang diusung oleh partai ini. Maka tak heran jika *Core frame* yang dibawa PKI di hadapan publik adalah masalah rakyat. Di banyak kampanyenya, kata “rakyat” menjadi satu faktor yang melingkupi wacana kampanyenya dan janji serta program yang ditawarkan. Hal ini jelas tampak dari pemilihan nama surat kabar milik PKI yang digunakan sebagai media kampanye dan alat gerak partai, yakni *Harian Rakjat* dan *Fikiran Rakjat* (Ahmad, 2016: 55). Selain itu, PKI juga menggunakan kata “rakyat” untuk semboyan partai, yakni: “PNI partai priyayi, Masyumi dan NU partai santri, tetapi PKI partai rakyat”. Semboyan ini digunakan sangat luas di daerah-daerah (Feith, 1999:22). Pemilihan kata “rakyat” dalam wacana-wacana yang dibawa

PKI adalah suatu langkah politis untuk menarik simpati hati rakyat. Secara tidak langsung, PKI sedang membentuk *frame* di hadapan publik bahwa ia adalah partai untuk rakyat.

Selain golongan petani dan buruh, beberapa organisasi juga dikenal dekat dan dianggap berafiliasi dengan PKI, yakni salah satunya adalah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Di tingkat daerah, organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan partai juga bergerak selain memang untuk kegiatan dan program kerja organisasi, secara tidak langsung kegiatan-kegiatan mereka juga menjadi nilai jual tersendiri untuk menarik massa. Hal ini juga dilakukan oleh Gerwani. Di Semarang, tepatnya di Desa Djangli Semarang Timur, Gerwani mendirikan kursus pemberantasan buta huruf untuk wanita, kursus kerajinan tangan, dll (*Suara Merdeka*, 4 Januari 1955). Selain mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, Gerwani juga seringkali memberi rekomendasi kebijakan dan desakan-desakan kepada pemerintah daerah yang isinya seputar aspirasi rakyat. Di Semarang, hasil konferensi Gerwani Semarang Utara menghasilkan beberapa desakan kepada pemerintah yang isinya antara lain adalah: mendesak kepada yang berwajib untuk mempercepat dilaksanakannya penyaringan air dari Kaligarang hingga dapat mencukupi kebutuhan umum, memperluas aliran-aliran listrik di kampung-kampung secara luas, mengadakan pembatasan dan larangan pemutaran film cabul dan pemutaran bioskop pada siang hari, dan pemutaran lagu-lagu Indonesia di gedung-gedung bioskop (*Suara Merdeka*, 2 Maret 1955). Kegiatan-kegiatan sosial semacam itu yang digerakkan oleh Gerwani secara tidak langsung memberi dampak positif terhadap PKI. Besar kemungkinan, PKI juga mengantongi massa dari kegiatan-kegiatan semacam itu.

### **Kampanye NU di Semarang**

Sadar akan basis kulturalnya, NU banyak memusatkan kegiatan kampanyenya dengan pendekatan agama dan hal-hal yang berbau kultur dan tradisi pesantren. Maka pesantren-pesantren menjadi tempat yang efektif untuk

menyebarkan pengaruh partai. Pola hubungan antara kyai atau pemuka agama dengan masyarakat baik santri maupun bukan juga menjadi hal yang diperhatikan NU untuk keperluan ideologisasi partai dan meraih massa. Maka tak heran jika ada beberapa nama besar kyai NU yang menjadi corong suara partai antara lain adalah K.H. Asnawi dari Kudus, K.H. Bisri Mustofa dari Rembang, K.H.A. Chaliq, H. Idam Chalid, K.H.M. Dachlan, H. Saefudin Zuhri, dan sebagainya (Putra, 2010:93). Di tingkat daerah, NU sering mengadakan pengajian-pengajian yang isinya memuat tentang masalah agama dan kebangsaan. Terlepas pengajian-pengajian ini adalah bentuk kampanye yang digencarkan oleh NU atau tidak, namun sedikit banyak kegiatan tersebut dapat memberi kesan di masyarakat terhadap NU. Disadari atau tidak, pengajian-pengajian tersebut baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat yang lebih rendah adalah sarana NU yang efektif untuk merawat basis massa.

Selain giat dalam menyelenggarakan pengajian-pengajian dan hal-hal teknis untuk persiapan pemilu 1955, NU juga gencar mengadakan rapat umum di daerah-daerah. Di Kota Semarang, Zainul Arifin sebagai orang partai berpidato di hadapan simpatisan dan pendukung NU di Alun-alun Utara Kota Semarang. Ia berpidato tentang konsepsi perekonomian dan moneter yang disampaikan oleh NU (*Suara Merdeka*, 6 Juni 1955). Konsepsi tersebut merupakan respon atau tanggapan NU terhadap surat terbuka Dr. Halim kepada Presiden Sukarno. NU akan mengajukan suatu konsepsi perekonomian dan moneter untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi Indonesia kala itu. Dengan pidato Zainul Arifin dalam rapat umum NU di Kota Semarang itu diharapkan NU mendapat citra sebagai partai yang peduli dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi Indonesia di era 1950-an, terutama kaitannya dengan substansi yang disampaikan Dr. Halim dalam surat terbukanya kepada presiden. NU sedang mencoba menampilkan diri dan memberi solusi atas masalah-masalah perekonomian. Secara tidak langsung, NU tampil dengan memberi

kesan kepada massa bahwa NU adalah partai yang mewakili harapan-harapan mereka.

### **Kampanye Masyumi di Semarang**

Pemilu 1955, seperti halnya partai-partai lain, Masyumi juga gencar melakukan kampanye-kampanye di berbagai tingkat. *Core frame* yang digunakan oleh masyumi dalam menyampaikan wacana-wacana kampanyenya adalah Islam. Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang bersifat modernis. Hal ini karena basis massa dari Masyumi adalah kalangan santri perkotaan. Namun demikian, isu ini justru digunakan lawan-lawan politik dari Masyumi untuk menjatuhkan Masyumi bahwa Masyumi merupakan partai yang menghendaki perubahan menjadi negara Islam. Oleh karena itu, dalam tiap melontarkan wacana dalam kampanye Masyumi juga selalu mengaitkan bahwa perjuangan Masyumi juga untuk tegaknya proklamasi (Ahmad, 2016: 56).

Persiapan menghadapi Pemilu 1955, Masyumi memperkuat kantong-kantong kekuatan di daerah-daerah. Hal ini dilakukan untuk merawat massa di daerah-daerah, selain terus melakukan kerja-kerja organisasi di tingkat pusat. Di Semarang, anak cabang Masyumi terus melakukan pembaruan dalam tubuhnya untuk mengakomodasi ide-ide anggotanya. Masyumi Anak Cabang Semarang Tengah misalnya, mereka melakukan perombakan pengurus. (*Suara Merdeka*, 14 Januari 1955) Hal ini tentu bukan tanpa sebab, perombakan ini tentu dimaksudkan untuk memilih orang-orang yang berkompeten untuk semakin memperkuat kerja organisasi di Semarang, mengingat sengitnya pertarungan wacana di daerah-daerah termasuk di Semarang.

### **Hasil Pemilu 1955 Di Kota Semarang**

Hasil resmi secara nasional, di Kota Semarang hasil resmi juga menempatkan “empat partai besar” di peringkat empat besar. Hanya saja urutan partainya berbeda. Di Kota Semarang posisi pertama atau puncak bukan ditempati oleh PNI melainkan PKI. PNI berada di satu tingkat di bawah PKI kemudian disusul oleh NU lalu Masyumi. Empat partai ini memperoleh 80%

dari seluruh total suara yang masuk. Berikut adalah tabel empat besar hasil resmi pemilu 1955 di Kota Semarang untuk parlemen.

**Tabel 1.** Hasil Pemilu 1955 di Kota Semarang

Kota	PKI	PNI	NU	Masyumi
<b>Semarang Barat</b>	20.592	4.669	4.734	1.939
<b>Semarang Tengah</b>	16.549	2.983	3.912	1.266
<b>Semarang Utara</b>	25.030	4.734	4.641	1.798
<b>Semarang Timur</b>	23.713	5.049	4.193	825
<b>Semarang Selatan</b>	11.268	4.050	1.433	579
<b>Presentase (%)</b>	<b>54%</b>	<b>12%</b>	<b>10,5%</b>	<b>3,5%</b>
<b>Total Suara</b>	<b>97.152</b>	<b>21.485</b>	<b>18.913</b>	<b>6.407</b>

Sumber: KPU Kota Semarang

Dari tabel di atas, nampaknya apa yang menjadi asumsi para pengamat politik pada saat itu sebagaimana yang ditulis Feith dalam bukunya yang berjudul *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* bahwa dalam pemilihan umum 1955 akan terjadi perimbangan kekuatan partai adalah asumsi yang meleset. Baik di tingkat nasional maupun di Kota Semarang, hasil pemilihan umum 1955 untuk parlemen benar-benar tidak menggambarkan perimbangan kekuatan, justru sebaliknya hasil pemilihan umum 1955 menunjukkan adanya ketimpangan kekuatan yang dalam. Di Kota Semarang, pemenang atau peroleh suara terbanyak yakni PKI, meraih suara lebih dari 50%. Sedangkan peringkat dua saja—PNI—terpaut jauh dengan hanya meraih suara 12%.

## SIMPULAN

Pengaruh kampanye yang dilakukan partai-partai politik terhadap hasil pemilihan umum tentu saja ada. Namun ada faktor lain yang juga turut mempengaruhi hasil pemilihan umum 1955 baik nasional maupun daerah, yakni latar belakang historis dan kondisi sosial-politik. Kita bisa melihatnya dari kasus Pemilu 1955 di Kota Semarang yang mengeluarkan PKI sebagai pemenang di Kota Semarang. Perlu diingat, bahwa PKI adalah partai yang paling tidak diuntungkan keadaannya saat menjelang Pemilu 1955. Sebab, pada tahun 1948 PKI mendapat

bencana karena aksinya dalam Peristiwa Madiun 1948. Hal ini membuat PKI mesti bekerja lebih keras untuk mengembalikan citranya. Disamping itu, pada saat menjelang Pemilu 1955, di tingkat nasional maupun daerah, PKI banyak mendapatkan serangan-serangan dari lawan politiknya, yang tentu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap *image* PKI di masyarakat. PKI memang memberi *counter* kepada lawan-lawan politiknya, namun jika mengingat serangan itu datang dari banyak partai politik, rasanya *counter* yang dilakukan PKI tidak berdampak signifikan. Di samping itu, di era 1950-an, tidak ada Perdana Menteri yang merupakan kader dari PKI.

Meski PKI mendapatkan kenyataan-kenyataan di atas, namun faktanya PKI dapat menjadi pemenang Pemilu 1955 di Kota Semarang dengan meraih suara lebih dari 50%. Mengapa hal ini terjadi? Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa selain kampanye, ada faktor lain yang membuat PKI keluar sebagai peraih suara terbanyak di Kota Semarang. *Pertama*, latar belakang historis Kota Semarang. Semarang adalah daerah dimana PKI lahir, tumbuh, dan berkembang. Di Semarang lah PKI memulai semuanya sejak masa kolonial, sehingga tek menjadi sebuah keheranan jika Kota Semarang menjadi basis PKI. *Kedua*, kondisi sosial-politik Kota Semarang. Pada masa kolonial, Semarang mengalami industrialisasi yang sangat pesat. Hal ini membuat Kota Semarang dihuni banyak buruh, selain juga petani. Industrialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial tersebut menimbulkan banyaknya praktik eksploitasi tenaga kerja dan terciptanya kesenjangan sosial. Dengan keadaan yang demikian, PKI muncul sebagai wadah untuk melawan praktik eksploitasi tersebut. Kemudian, PKI beberapa kali melakukan pemogokan besar-besaran yang merepotkan pemerintah kolonial. Kondisi sosial-politik Kota Semarang ini membuat PKI dan semangat yang diusungnya hidup dan berkembang di kota ini. Dua faktor inilah yang turut memberi pengaruh terhadap hasil pemilihan umum 1955 di Kota Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Surat Kabar

- “Masjumi Anak Tjabang Semarang Tengah”. 1955. dalam *Suara Merdeka* 14 Januari 1955.
- “Hasil Konperensi Gerwani Semarang Utara”. 1955. dalam *Suara Merdeka* 2 Maret 1955.
- “NU Siapkan Konsepsi Perekonomian dan Monetair”. 1955. dalam *Suara Merdeka* 6 Juni 1955.
- Suluh Indonesia* 14 September 1955.
- Suara Merdeka* 26 September 1955.
- Suara Merdeka* 27 September 1955.
- Suluh Indonesia* 27 September 1955.

### Artikel, Buku, Jurnal, dan Skripsi

- Ahmad, Tsabit Azinar. 2014. “Sarekat Islam dan Gerakan Kiri di Semarang 1917-1920” dalam *Jurnal Sejarah dan Budaya*. Tahun Kedelapan, No.2.
- , 2016. “Kampanye dan Pertarungan Politik di Jawa Tengah Menjelang Pemilihan Umum 1955” dalam *Jurnal Paramita* Vol. 26, No.1.
- Compton, Boyd. R. 1993. *Kemelut Demokrasi Liberal*. Jakarta: LP3S.
- Dewantarina, Aryani. 2017. “Partai Nasional Indonesia pada Pemilihan Umum 1955” dalam *Journal of Indonesian History* Vol. 1, No. 2.
- Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: KPG.
- Firdausi, Fadrik Aziz. 2017. *Njoto: Biografi Pemikiran 1951-1965*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusuma Putra, Khanifan. 2010. “Perang Wacana Kampanye Partai Politik di Media Massa pada Pemilihan Umum 1955 (Studi Kasus PNI, PKI, Masyumi, dan NU di Jawa Tengah)”. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Noer, Deliar & Akbarsyah. 2005. *KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat, Parlemen Indonesia 1945-1950*. Jakarta: Yayasan Risalah.
- Wasino dan Endah Sri Hartatik. 2018. *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset Hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.